

Menteri Susi: Kalau Tak Ada Perbudakan di Benjina, Kita Tak Sadar

Wiji Nurhayat - detikfinance

Senin, 27/04/2015 18:26 WIB

[Perbudakan Ada di Mana-Mana](#)

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bercerita soal kasus perbudakan di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku kepada Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

Ia mengungkapkan bila tak ada kasus benjina, pemerintah tak akan sadar bahwa ada banyak orang Indonesia yang jadi ABK di luar negeri yang nasibnya bisa saja diperbudak.

"Kalau tidak ada kejadian Benjina, kita tidak sadar ABK Indonesia dengan kondisi yang sama. Ada 54 orang Indonesia yang ditangkap di Myanmar dan dihukum 5 tahun," kata Susi pertama kali bercerita di rumah kediamannya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Pusat, Senin (28/04/2015).

Kedua menteri tersebut bertemu di rumah dinas Menteri Susi di kompleks Widya Chandra, Jakarta. Susi mencoba mengungkapkan kasus lain yang terjadi di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku. Kali ini praktik suap-menyuap yang secara blak-blakan.

"Yang kita selidiki apakah itu suap atau tidak. Apakah itu pungli terhadap petugas KKP sendiri, tetapi hal ini tidak menjadikan legalisasi dari pencurian ikan yang mereka lakukan. Mereka tetap melakukan kejahatan. [Kejahatan dengan suap sana-suap sini karena itu cara mudah untuk mendapatkan uang," kata Susi.

Lalu cerita lainnya yang Susi ungkapkan adalah praktik perbudakan PT Pusaka Benjina Resources (PBR) kepada anak buah kapal (ABK) asing asal Myanmar, Kamboja, dan Laos di Benjina. Susi mengaku geram karena ABK asing diperlakukan buruk dan tidak mendapatkan gaji sama sekali saat bekerja. Hal ini terungkap saat para ABK dipindahkan oleh pemerintah dari Benjina ke Tual, Maluku.

"Mereka nenteng kresek baju ganti. Mereka hanya menggunakan satu buah helai baju dan ada yang bekerja sudah 5-10 tahun. Jadi kita tidak bisa lihat pelaku saja. Kalau bisa stakeholdernya siapa?" tanya Susi bernada kecewa.

Merespons pernyataan Susi, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan bila pelaku usaha melakukan hal seperti yang Susi ungkapkan, maka menurut ketentuan izin usaha bisa dicabut. Selain itu, nama pelaku usaha dan perusahaan juga akan di-blacklist atau masuk catatan hitam dan tidak boleh melakukan usaha serupa selama 5 tahun berturut-turut.

"Kita ada aturan PPTKIS (Pengerah Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta). Perusahaan akan dicabut Surat izin penempatan (SIP) dan pemilknnya di-blacklist tidak boleh berkecimpung dalam kegiatan yang sama selama 5 tahun. Jadi tidak punya ruang lagi dia. Kalau sudah melanggar cabut," tegasnya.

Seperti diketahui kasus perbudakan di Benjina melibatkan PT Pusaka Benjina Resources (PBR). Kasus perbudakan pertama kali diungkap oleh AP (Associated Press) dalam investigasinya yang berjudul "Are slaves catching the fish you buy?" pada 25 Maret 2015. Beberapa Anak Buah Kapal (ABK) warga negara asing menjadi korban perbudakan seperti dari Thailand, Myanmar, dan lainnya.

(wij/hen)

Sumber: <http://finance.detik.com/read/2015/04/27/182635/2899616/4/menteri-susi-kalau-tak-ada-perbudakan-di-benjina-kita-tak-sadar>

Karena Pencurian Ikan dan Perbudakan, Thailand Dapat Sanksi Uni Eropa

Wiji Nurhayat - detikfinance

Selasa, 28/04/2015 12:18 WIB

Jakarta -Uni Eropa (UE) akhirnya mengeluarkan sikap untuk menjatuhkan sanksi kepada Thailand pasca terungkapnya kasus perbudakan di Benjina, Kepulauan Aru oleh perusahaan PT Pusaka Benjina Resources (PBR). Tidak hanya praktik perbudakan, PBR diketahui juga mengoperasikan kapal-kapal ikan tangkap dan angkut asing milik Thailand dengan nama Antasena.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan, saat ini UE menjatuhkan sanksi berupa kartu kuning kepada Thailand.

"Kemarin tim berangkat ke Brussel, Belgia dan kita meyakinkan UE memberikan kartu kuning untuk Thailand dan Pemerintah Thailand. UE menyatakan, kepada kita, aktivitas pemberantasan *illegal fishing* yang kita lakukan sudah benar," kata Susi saat ditemui pada acara Seminar Nasional Membangun Poros Maritim Dunia dalam Perspektif Tata Ruang Laut Nasional di Indonesia di Gedung Mina Bahari III, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Selasa (29/4/2015).

Dengan diberikannya kartu kuning kepada Thailand, UE mulai membatasi impor produk perikanan dari Thailand. Susi mengatakan, Thailand cukup dirugikan karena produk perikananannya mulai ditolak oleh beberapa buyer di UE. Di satu sisi, Indonesia justru diuntungkan dengan kejadian ini.

"Produk Thailand akan mengalami restriksi (pembatasan) oleh pembeli di Eropa. Sudah harusnya kita manfaatkan dengan membawa pelaku industri kita lebih maju. Jadi pekerjaan rumah kita untuk memanfaatkan momentum ini. Kita tidak mau lagi menjadi penonton," tekan Susi.

Setelah sah memberikan sanksi berupa kartu kuning kepada Thailand, UE punya pesan khusus kepada Indonesia. UE mewanti-wanti agar Indonesia berhati-hati terhadap modus baru para pelaku pencurian ikan yang bisa saja menyeret nama Indonesia ke tingkat dunia.

"Para pelaku *illegal fishing* mulai membeli lisensi (izin industri pengolahan) ke Papua Nugini, dan janjinya sama seperti di kita. Tetapi mereka beralasan karena di Papua Nugini tidak ada listrik, akhirnya harus diekspor ke Indonesia. Jadi mereka lari lewat Papua Nugini," kata Susi.

Di tempat yang sama, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP Saut P Hutagalung mengungkapkan, kartu kuning yang diterima Thailand dari UE berlaku 22 April 2015. Ia menjelaskan, alasan pemberian sanksi berupa kartu kuning disebabkan Thailand banyak melakukan praktik *illegal fishing* dan pelanggaran ketenagakerjaan Anak Buah Kapal (ABK). Ia juga menilai, Thailand cukup dirugikan dengan pengenaan sanksi tersebut.

"Tanggal 22 April 2015 berlaku jadi warning bagi Thailand kalau selangkah lagi dia akan mendapatkan kartu merah artinya di-*banned*. Dia masih bisa berdagang tetapi ada sebagian *buyer* yang tidak mau. Alasannya karena IUU *fising* dan dari sisi ketenagakerjaan. UE bisa mendapatkan informasi dari mana-mana," jelas Saut.
(wij/rrd)

Sumber: <http://finance.detik.com/read/2015/04/28/121808/2900184/4/karena-pencurian-ikan-dan-perbudakan-thailand-dapat-sanksi-uni-eropa>

Selasa, 28/04/2015 17:30 WIB

Bareskrim Geledah Kantor PBR Benjina, Cari Bukti Kasus Perdagangan Orang

Andri Haryanto - detikNews

Dok. detikcom

Jakarta - Tim Satuan Tugas Perdagangan Orang (Trafficking) Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Pusaka Bahari Resources (PBR) di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku. Penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti kasus dugaan praktik perdagangan orang di Benjina yang jadi sorotan.

Informasi yang dikumpulkan detikcom, penggeledahan dilakukan Senin (27/4/2015). Penggeledahan dilakukan empat jam dari pukul 11.00 hingga pukul 15.00 WITA.

Penggeledahan difokuskan mencari alat bukti yang mengarah pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Anggota Satgas yang juga Kepala Unit TPPO Direktorat Tindak Pidana Umum (Tipidum) Bareskrim, AKBP Arie Dharmanto, membenarkan adanya penggeledahan tersebut.

Disinggung mengenai hasil penggeledahan, Arie menolak menjawab secara rinci.

"Hanya dokumen-dokumen terkait," kata Arie saat dihubungi detikcom, Selasa (28/4).

Sumber: <http://news.detik.com/read/2015/04/28/173023/2900607/10/bareskrim-geledah-kantor-pbr-benjina-cari-bukti-kasus-perdagangan-orang>

(ahy/fdn)

Selasa, 28/04/2015 17:42 WIB

AS Bantu US\$ 225 ribu Untuk Penanganan ABK Benjina Korban Perbudakan

Rachmadin Ismail - detikNews

Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana membantu pemerintah Indonesia dan International Organization for Migration (IOM) terkait penanganan ratusan ABK non Thailand yang menjadi korban perbudakan Benjina, Maluku. Dana yang disiapkan adalah US\$ 225 ribu.

Dalam siaran pers yang disampaikan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, Selasa (28/4/2015), pemerintah AS ingin membantu upaya penyelamatan ratusan nelayan Myanmar, Kamboja, Laos dan Thailand, yang menjadi korban kerja paksa. Dana tersebut diharapkan dapat mendukung program yang sudah berjalan saat ini.

"Kedutaan Besar Amerika Serikat memuji kecekatan pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan para korban dan mendukung kepemimpinan Indonesia dalam memerangi perdagangan manusia dalam industri perikanan dan menghukum siapapun yang bertanggungjawab atas perdagangan manusia tersebut," tulis Kedubes AS.

"Amerika Serikat berharap bahwa peristiwa tragis ini akan meningkatkan kesadaran akan isu tersebut dan mendukung lahirnya sebuah pendekatan global untuk mengatasi masalah tersebut secara sistematis," sambungnya.

Dana dari AS tersebut akan mendukung biaya untuk pekerja sosial, staf medis, dan tenaga pendamping dari IOM Indonesia, serta bantuan langsung, yang mungkin mencakup perawatan medis, makanan dan air, tempat tinggal, dan bantuan untuk kembali dan berintegrasi bagi para korban perdagangan manusia.

Sebelumnya, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Asep Burhanuddin mengatakan para ABK asing PT Pusaka Benjina Resources (PBR) yang sudah dipindahkan dari Benjina ke Tual, Maluku, kondisinya terkatung-katung. Ada yang sudah stres hingga mengganggu lingkungan sekitar.

Menurut catatan KKP, ada 322 orang ABK sudah dipindahkan dari Benjina ke Tual, Maluku yang terdiri dari 256 orang dari Myanmar, 58 orang dari Kamboja dan 8 orang dari Laos. Delegasi Myanmar sendiri sudah mengunjungi langsung Tual untuk mendata warga negara Myanmar agar segera dikembalikan ke negaranya. Sedangkan delegasi dari Kamboja dan Laos belum datang.

Sejak dipindahkan tanggal 3 April 2015 lalu hingga saat ini, KKP sudah mengeluarkan dana operasional untuk memenuhi kebutuhan pakan dan kebutuhan lain bagi 322 orang ABK sebesar lebih dari Rp 150 juta. Dana yang dipakai adalah alokasi dana yang diberikan Direktorat Jenderal PSDKP KKP kepada Stasiun PSDKP Tual yang tahun ini jumlahnya mencapai Rp 300 juta. Namun menurut Asep, mulai 17 April 2015, dana operasional sudah dilimpahkan sepenuhnya oleh International Organization for Migration (IOM).

Sumber: <http://news.detik.com/read/2015/04/28/174215/2900620/10/as-bantu-us--225-ribu-untuk-penanganan-abk-benjina-korban-perbudakan>

(mad/nwk)

Lapor ke Jokowi, Menteri Susi Minta Perusahaan Perbudakan Benjina Ditutup

Bagus Prihantoro Nugroho - detikfinance

Selasa, 28/04/2015 20:15 WIB

[Perbudakan Ada di Mana-Mana](#)

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah melaporkan kasus perbudakan anak buah kapal (ABK) di Benjina, Aru, Maluku, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi hari ini di Istana, Susi meminta PT Pusaka Benjina Resources (PT PBR), selaku pihak yang terlibat kasus ini ditutup usahanya. Susi sebelumnya telah mengirimkan surat ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang usulan pencabutan izin usaha PT PBR.

"Ya memang harus ditutup. Karena banyak pelanggaran," katanya di Istana, Selasa (28/4/2015)

Ia mengatakan, semua perizinan PT PBR yang terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) dan lainnya telah dicabut.

"Katanya ada di saya semua (izinnya) kalau di saya ya sudah dicabut. Coba tanya ke Pak Franky (Kepala BKPM). Izin tangkapnya sudah tidak ada lagi," katanya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani belum bisa mencabut izin usaha atau izin prinsip dari PT Pusaka Benjina Resources (PT PBR). PT PBR disebut-sebut sebagai pelaku perbudakan di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku.

Mau tahu alasannya klik [di sini](#).

(hen/dnl)

Sumber: <http://finance.detik.com/read/2015/04/28/201548/2900789/4/lapor-ke-jokowi-menteri-susi-minta-perusahaan-perbudakan-benjina-ditutup>